

# MARTEN NONO

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 12-Jan-2022 11:10PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1740945914

**File name:** MARTEN\_NONO.docx (16.69K)

**Word count:** 1289

**Character count:** 8882

## Model Pembangunan Partisipatoris Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa

(Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

### RINGKASAN

Model pembangunan partisipatoris dalam mewujudkan kemandirian desa merupakan program bersama yang dilakukan secara sinergitas. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan didalam penelitian ini sedangkan cara pengumpulan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kades,sekdes,masyarakat dan kaur perencanaan merupakan informasi dalam penelitian. *purposive sampling* cara menentukan sampel. Hasil penelitian terkait Model Pembangunan Partisipatoris Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa melalui beberapa tahap, Pertama: Bentuk Partisipasi Non Fisik. Dalam bentuk non fisik bentuk partisipasi masyarakat sudah baik hal ini dilihat dari masyarakat yang mengikuti musyawarah di desa. Kedua: Bentuk Partisipasi Secara Fisik. Dalam bentuk partisipasi fisik masyarakat desa mengikuti gotong royong dalam membangun jalan. Ketiga:Partisipasi Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa. Semangat masyarakat dalam partisipasi untuk mewujudkan kemandirian desa sangat antusias karena masyarakat sudah berfikir akan berdampak positif untuk desanya. Keempat Dukungan Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia. Dukungan SDM masyarakat Desa Kucur saat ini masih minim apabila ditinjau dari segi pendidikan. Namun berbanding terbalik jika dilihat dari segi pengalaman masyarakat desa kucur sangat memadai.

**Kata kunci:** Model Pembangunan Partisipatoris, Kemandirian Desa

## BABI PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Pembangunan Industri 4.0 ialah proses perwujudan cita-cita negeri buat mewujudkan warga yang makmur serta sejahtera secara menyeluruh di daerah Indonesia. Pembangunan dikatakan terwujud dalam warga makmur serta sejahtera bila dapat dinikmati secara menyeluruh oleh segala rakyat Indonesia. Kasus mencuat dari bermacam aspek pemicu dimana salah satu faktornya merupakan aspek geografis. Keadaan geografis daerah Indonesia terdiri atas banyak pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan dimana penduduknya tersebar di hampir segala pulau yang terdapat di Indonesia secara tidak menyeluruh, aspek persebaran penduduk yang tidak menyeluruh ditambah lagi dengan akses ataupun infrastruktur yang tidak sama serta menyeluruh. Reily (2018), melaporkan kalau indeks pembangunan infrastruktur wilayah masih belum menyeluruh di sebagian bagian Indonesia, khususnya di bidang teknologi data serta komunikasi.

Jadwal otonomi wilayah yang dicoba pemerintah di Indonesia diharapkan selaku pemecahan buat tingkatkan integrasi sosial di warga. Tidak hanya itu, otonomi wilayah dikira selaku opsi pas buat tingkatkan derajat keadilan sosial dan distribusi kewenangan secara sepadan antara pemerintah pusat, pemerintahan wilayah dalam perihal penentuan kebijakan publik, kemampuan peninggalan serta politik dan sumber energi lokal (Nugraha, 2019). sebab kebijakan merupakan selaku keputusan pemerintah apapun langkah yang dicoba pemerintah dalam pengambilan keputusan sebab kebijakan publik selaku keputusan pemerintah (Sasmito, C., Laka, Y. H., & Gunawan, C. I. 2020).

Kedudukan dan warga, pemerataan, keadilan, dan mencermati kemampuan serta keanekaragaman wilayah ialah prinsip demokrasi pembangunan. Pembangunan yang menyeluruh ialah salah satu tugas dari seluruh komponen bangsa dalam rangka menggapai tujuan bernegara serta cita-cita nasional. Berbanding lurus dengan Undang-Undang Bawah 1945 yang menyatakan kalau tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia merupakan buat melindungi segenap bangsa serta segala tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan universal, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melakukan kedisiplinan dunia.

6  
Buat mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan warga sepenuhnya. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran penerapan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada keahlian aparatur pemerintah, namun pula berkaitan dengan upaya mewujudkan keahlian serta keamanan warga buat berpartisipasi dalam penerapan program pembangunan. Sehingga implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 2 yang melaporkan kalau perlunya pembangunan desa secara sistematis, tidak berubah-ubah serta berkepanjangan dengan fasilitasi, supervisi serta pendampingan bisa dilaksanakan dengan optimal. Lebih lanjut undang-undang no 22 tahun 1999 pasal 3 tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan wilayah (Kemenkeu RI, 2019).

1  
Maksudnya, pembangunan wilayah diiringi dengan otonomi wilayah sangat relevan dengan pembangunan secara merata, dinyatakan kalau ada 4 perihal yang mendasari terdapatnya penyamarataan keuangan antara pusat, wilayah ataupun pembangunan wilayah ialah awal, pembangunan wilayah sangat pas diimplementasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumber energi publik semacam zona perikanan, pertanian serta kehutanan. Kedua, pembangunan wilayah diyakini sanggup penuhi harapan keadilan ekonomi untuk sekian banyak orang yang tercermin dalam otonomi wilayah. Ketiga, pembangunan wilayah bisa memencet bayaran transaksi. Keempat, pembangunan wilayah bisa tingkatkan energi beli dalam negeri yang lagi meningkatkan wilayah pariwisata. Sehingga otonomi selaku bentuk dari desentralisasi bisa ditatap selaku sesuatu asas ataupun metode pemberian peluang yang relatif luas untuk tumbuhnya partisipasi warga dalam upaya penerapan pembangunan desa (Nugraha, 2019: 12).

Partisipasi warga dalam pembangunan sangatlah berarti, serta sangat diperlukan dalam keadaan saat ini ini, semacam dengan terdapatnya swadaya dari warga, bisa diatasi sedangkan walaupun masih banyak kekurangan paling utama permasalahan dana. Bila partisipasi dari warga sangat sedikit, hingga pembangunan desa hendak jadi sangat lambat mengarah yang diharapkan bersumber pada rencana yang telah diprogramkan, dengan tidak bergantung pada pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Partisipasi warga dari segala susunan desa dibutuhkan buat mewujudkan pembangunan desa yang cocok dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang sangat berarti merupakan partisipasi dari tiap warga yang ialah pemegang kedaulatan dari negeri ini (Sigalingging serta Warjio, 2014: 6). Minimnya warga yang turut dan dalam penerapan pekerjaan bisa menimbulkan minimnya keahlian kerja yang dipunyai dan tidak mempunyai rasa yakin kepada pemerintah dalam mengelola program yang berakibat pada

partisipasi warga desa dalam perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan desa( Rahman, 2016: 5). Bersumber pada riset pendahuluan dengan tata cara observasi serta wawancara dini kepada warga Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang ditemukan kalau sebagian masyarakat Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang masih belum menyadari pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya, sementara itu partisipasi mereka dalam wujud turut dan dalam proses aktivitas pembangunan serta pemberian sumbangan pembangunan hendak sangat menolong terealisasikannya pembangunan tersebut.

Pemerintah Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang wajib lebih menjalankan komunikasi yang baik kepada masyarakatnya demi meyakinkan warga tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan di Desa, sehingga bisa tingkatkan partisipasi warga( Dinas Komunikasi serta Informatika, 2018). Terdapatnya partisipasi warga Desa diharapkan bisa tingkatkan pembangunan yang berorientasi cocok dengan yang diperlukan oleh warga Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penerapan pembangunan yang telah cocok dengan kebutuhan warga hendak berakibat kepada kemandirian Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kemandirian pula diartikan selaku perlengkapan kontrol supaya tujuan organisasi bisa terwujud. Kemandirian yang diartikan dalam konteks ini merupakan strategi pemerintah desa dalam mengelola desa serta tingkatkan taraf kehidupan warga desa.

Indeks Desa Membangun tidak hendak tercapai. Dalam konteks nyata, sehingga kemandirian yang diartikan dalam riset ini merupakan keahlian warga desa beserta aparatur Negeri dalam perihal pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa, pengadaan fasilitas serta prasarana desa, serta pengelolaan kelembagaan desa cocok dengan peraturan penerapan undang- undang desa yang berlaku. Oleh karena itu, butuh terdapatnya strategi- strategi dari desa supaya terwujudnya desa yang mandiri. Bersumber pada latar balik diatas hingga periset butuh melaksanakan kajian terpaut perkara partisipasi warga guna meningkatkan kemandirian desa dengan judul“ Model Pembangunan Partisipatoris dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Riset Permasalahan di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”

## 1. 2. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar balik permasalahan yang dipaparkan di atas, hingga rumusan permasalahan dalam riset ini dijabarkan selaku berikut:

1. Gimana model pembangunan partisipatoris dalam mewujudkan kemandirian **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang?**

2. Apa saja aspek pendukung Model Pembangunan Partisipatoris dalam mewujudkan kemandirian **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang?**

3. Apa saja aspek penghambat Model Pembangunan Partisipatoris dalam mewujudkan kemandirian **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang?**

### 1. 3. Tujuan Penelitian

Ada pula tujuan dari riset ini hendak dijabarkan selaku selaku beriku:

1. Buat mengenali model pembangunan partisipatoris warga dalam mewujudkan kemandirian **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.**

2. Buat mengenali aspek pendukung model pembangunan partisipatoris dalam mewujudkan kemandirian **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.**

3. Buat mengenali aspek penghambat model pembangunan partisipatoris dalam mewujudkan kemandirian **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.**

### 1. 4. Khasiat Penelitian

Khasiat riset yang diharapkan lewat riset ini merupakan:

1. Secara Akademis riset ini bisa memberikan donasi pemikiran untuk pertumbuhan ilmu administrasi public terpaut dengan perencanaan pembangunan desa khususnya **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.**

2. Secara Instan riset ini sanggup memberikan masukan yang berguna untuk warga **Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang** selaku penyelenggara modal pembangunan desa guna mengarah desa yang mandiri.

# MARTEN NONO

---

## ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://www.wawasanpendidikan.com">www.wawasanpendidikan.com</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://contohmakalah-doc.blogspot.com">contohmakalah-doc.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a> Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1%
6	Asnar Asnar. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR SAMARINDA", Gulawentah:Jurnal Studi Sosial, 2016 Publication	1%
7	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%

---

8

csws.fisip.unair.ac.id

Internet Source

1 %

---

9

id.123dok.com

Internet Source

1 %

---

10

www.scribd.com

Internet Source

1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On